

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat dalam teknologi digital menjadikan sektor ekonomi digital semakin krusial untuk diperhatikan dan dikembangkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2022-2023, terdapat 215,63 juta pengguna internet aktif di Indonesia, yang merupakan 78,19% dari total populasi negara ini, yaitu 275,77 juta jiwa. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengguna *smartphone* aktif di Indonesia melampaui jumlah populasi total. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pasar ponsel di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan.

Bertambahnya jumlah pengguna internet dan *smartphone* di Indonesia mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Dengan kemudahan tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya diberbagai aspek kehidupan. Hal ini terbukti dengan kegiatan transaksi digital yang mereka lakukan sehari-hari.

Uang adalah suatu instrumen yang berfungsi sebagai media pertukaran dalam transaksi ekonomi untuk barang dan jasa yang diperoleh secara sah. Evolusi sistem pembayaran dimulai dari pertukaran barang secara langsung hingga penggunaan uang sebagai media transaksi. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, termasuk terciptanya berbagai inovasi. Salah satu inovasi tersebut adalah kehadiran uang elektronik, yang merupakan hasil dari penerapan teknologi dan informasi terkini (Ningsih et al., 2021).

Kehadiran uang elektronik di Indonesia dipengaruhi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, yang bertujuan untuk mempromosikan terciptanya masyarakat tanpa uang tunai. Uang elektronik dirancang untuk memfasilitasi proses pembayaran dengan menggantikan penggunaan uang fisik

dengan bentuk digital (Utami & Kusumawati, 2017). Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi sehari-hari. Dengan kemajuan teknologi, sistem pembayaran yang berbasis elektronik secara perlahan menggeser dominasi uang tunai, yang dianggap lebih praktis dan efisien (Parastiti et al., 2015).

Masyarakat Indonesia mulai menyadari dan merasakan manfaat dari adanya *cashless society* dalam hal transaksi pembayaran, hal tersebut terlihat dari transaksi uang elektronik di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada Agustus 2023, nilai transaksi menggunakan uang elektronik secara nasional mencapai Rp 38,5 triliun. Nominal tersebut tumbuh sebanyak 1,9 persen dibandingkan tahun lalu. Peningkatan yang signifikan dalam penggunaan uang elektronik di Indonesia mencerminkan minat masyarakat yang tinggi terhadap metode pembayaran ini. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pesat jumlah pengguna uang elektronik dari tahun ke tahun. Dukungan terhadap tren ini semakin kuat dengan adanya berbagai jenis layanan pembayaran tanpa tunai, termasuk salah satunya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS memudahkan transaksi dengan mengintegrasikan berbagai metode pembayaran elektronik ke dalam satu sistem yang seragam.

Dalam upaya mempromosikan pembayaran digital di Indonesia, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) secara resmi meluncurkan *QR Code* yang dikenal sebagai *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)* pada tanggal 17 Agustus 2019. *QRIS* adalah standar kode QR nasional yang memfasilitasi transaksi pembayaran melalui berbagai aplikasi dompet digital dan perbankan. Peresmian penggunaan *QRIS* menjadi bukti pemerintah dalam mendorong transformasi digital dalam sistem pembayaran nasional.

Kemajuan teknologi yang terus berkembang dalam sistem pembayaran ini telah membawa perubahan yang besar kedalam dunia bisnis, terutama dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Handayani & Soeparan, 2022). UMKM merupakan usaha yang dimiliki oleh suatu organisasi bisnis ataupun perseorangan. UMKM menyumbang lebih dari setengah PDB Indonesia, oleh

karena itu keterlibatannya dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting. Setiap tahun jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Perkembangan tersebut terjadi karena meningkatnya minat masyarakat terhadap UMKM. Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun 2016 – 2019 dapat terlihat pada data dari Kementerian Koperasi dan UMK Republik Indonesia di bawah ini (kemenkopukm.go.id, 2024).

Tabel 1 1 Perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2017-2019

No.	Usaha	Satuan	2017	2018	2019
1	Mikro	Unit	62.106.900	63.350.222	64.601.352
2	Kecil	Unit	757.090	783.132	798.679
3	Menengah	Unit	58.627	60.702	65.465
Total			62.922.617	64.194.057	65.465.497

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMK Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut, usaha mikro memegang pangsa pasar terbesar. Hal ini menunjukkan sektor usaha mikro adalah yang sangat disukai masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan mengatakan bahwa pertumbuhan inovasi dalam sektor keuangan digital dapat didorong lebih lanjut oleh potensi besar yang dimiliki oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Oleh karena itu perkembangan teknologi di era digital saat ini dapat dijadikan langkah strategis bagi UMKM untuk terus berkembang dan memperluas daya saingnya (Sholihin, 2024).

Data dari Sensus Ekonomi BPS Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki jumlah yang paling banyak dari usaha lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro juga banyak diminati di DKI Jakarta dan berpotensi untuk meningkatkan perekonomiannya. Tabel berikut menunjukkan perkembangan UMKM di DKI Jakarta:

Tabel 1 2 Data UMKM di DKI Jakarta

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Kepulauan Seribu	3,398	333	29	3,760
2	Jakarta Selatan	179,040	49,409	15,089	243,538
3	Jakarta Timur	203,645	50,213	8,838	262,696
4	Jakarta Pusat	99,160	48,553	12,094	159,807
5	Jakarta Barat	239,847	67,111	9,651	316,609
6	Jakarta Utara	180,679	38,913	8,418	228,010
Provinsi DKI Jakarta		905,769	254,532	54,119	1,214,420

Sumber: Sensus Ekonomi BPS 2016

Kemunculan *QRIS* sebagai bentuk inovasi dari teknologi keuangan digital ini diharapkan dapat memajukan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 2020, Bank Indonesia mencatat pengguna UMKM yang sudah mengadopsi *QRIS* sebagai alat pembayaran telah mencapai 5,8 juta *merchant*. Jumlah itu terus tumbuh hingga mencapai 12 juta *merchant* pada 2022. Persepsi masyarakat terkait manfaat dan kemudahan QRIS juga berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penggunaan QRIS oleh UMKM sehingga menarik minat mereka untuk menggunakannya.

Bank Indonesia bersama Penyedia Jasa Pembayaran telah melakukan kolaborasi perluasan akseptansi *QRIS* sejak tahun 2019 dan hal tersebut berdampak bagi pertumbuhan transaksi digital di DKI Jakarta. Sampai Maret 2024, akselerasi *QRIS* masih terus berlanjut terbukti dari kenaikan volume transaksi yang mencapai 632 juta. Pencapaian tersebut juga didukung dengan penggunaan *QRIS* oleh pelaku UMKM yang terus mengalami peningkatan signifikan, saat ini jumlahnya telah mencapai 12,2% pangsa nasional (sindo.news, 2024).

QRIS sebagai standarisasi pembayaran berbasis *QR code* menawarkan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat terutama pelaku UMKM, salah satunya adalah menurunkan risiko pembayaran dengan uang palsu dan transaksi keuangan dapat tercatat otomatis (Puriati et al., 2023). Kemudahan dan manfaat yang dirasakan seseorang ketika menggunakan sebuah teknologi dapat mempengaruhi minat penggunaannya (Hantono et al., 2023). Minat adalah keinginan untuk terlibat dalam aktivitas tertentu (Jogiyanto, 2007). Perilaku seseorang adalah aktivitas yang akan mereka lakukan. Jika seseorang termotivasi atau tertarik untuk melakukan sesuatu, maka mereka akan mengambil tindakan. Hasil penelitian (Mahyuni & Setiawan, 2021) memberikan bukti bahwa niat pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh persepsi manfaat dan kemudahan.

Bank Indonesia sebagai pelopor sistem pembayaran digital *QRIS* terus berupaya untuk mensosialisasikan penggunaan *QRIS* dan menganjurkan setiap usaha untuk memiliki *QRIS*. Meskipun *QRIS* memberikan kemudahan dan manfaat bagi penggunaannya, namun kenyataannya beberapa pelaku UMKM masih belum

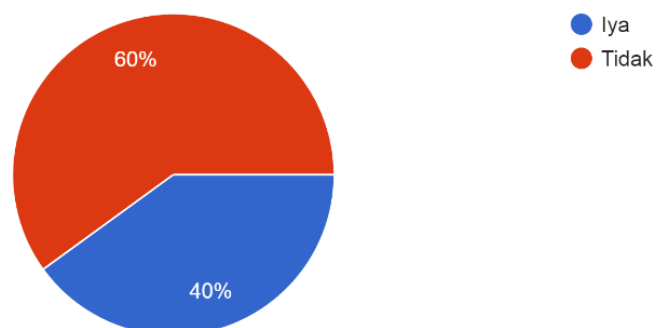
memanfaatkannya sebagai metode pembayaran. Hanya sekitar 17,2 juta atau 26,5%, dari lebih dari 65 juta pelaku UMKM di Indonesia yang telah melakukan transisi ke ranah digital. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi digital oleh UMKM masih belum merata. Selain itu, penggunaan *QRIS* juga masih jarang digunakan oleh UMKM yang berada di daerah pelosok.

Hasil penelitian (Zeta Chandra et al., 2023) terkait strategi *QRIS* oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta dalam upaya pengembangan pembayaran non tunai pada pelaku UMKM menunjukkan bahwa hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang *QRIS*, serta pembayaran secara tunai yang masih digemari oleh sejumlah UMKM. Disisi lain, masih ada juga pelaku UMKM yang memilih sistem pembayaran uang elektronik dengan *QR code* lain seperti Gopay, OVO, Shopeepay, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena *e-wallet* tersebut lebih terkenal dan banyak digunakan oleh konsumen. Meskipun demikian, penggunaan *QR code e-wallet* tersebut hanya dapat digunakan dengan aplikasi yang sama dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan *QRIS* yang mampu digunakan dengan aplikasi yang berbeda.

Permasalahan terkait penggunaan *QRIS* oleh pelaku UMKM di atas juga didukung oleh pra riset yang telah peneliti lakukan kepada 30 pelaku UMKM di DKI Jakarta. Berikut hasil dari pra riset yang peneliti lakukan terkait penggunaan *QRIS* oleh pelaku UMKM di DKI Jakarta.

Apakah anda menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai?

30 jawaban

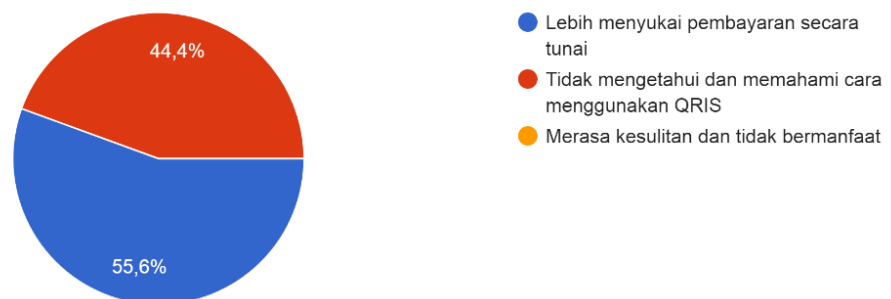


Gambar 1 1 Penggunaan *QRIS* oleh UMKM
Sumber: Data diolah (2024)

Hasil dari pra riset tersebut menunjukkan sebanyak 18 atau 60% pelaku UMKM tidak menggunakan *QRIS* sebagai metode pembayaran. Hal ini menunjukkan rendahnya minat untuk menggunakan *QRIS* oleh pelaku UMKM. Hasil dari pra riset menunjukkan penyebab pelaku UMKM tidak menggunakan *QRIS* adalah preferensi mereka terhadap pembayaran non-tunai dan ketidaktahuan mereka akan cara kerja sistem tersebut.

Apa alasan anda tidak menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran?

18 jawaban



Gambar 1 2 Penyebab UMKM tidak menggunakan *QRIS*
Sumber: data diolah (2024)

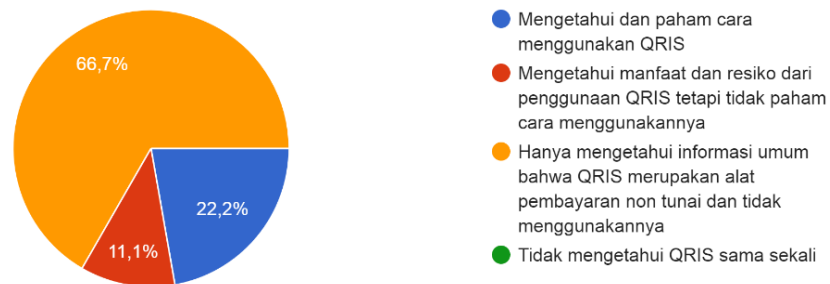
Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital menggunakan *QRIS* masih sulit diterapkan oleh beberapa pelaku UMKM karena kurangnya literasi terkait produk atau layanan keuangan (Indriani et al., 2023). Salah satu hal yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk mengadopsi teknologi finansial adalah tingkat literasi keuangan. Seseorang dapat terhindar dari masalah keuangan jika memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi. (Indahyani & Dewi, 2021). Selain pendapatan yang rendah, manajemen keuangan yang buruk seperti menyalahgunakan kartu kredit atau tidak mengikuti perkembangan teknologi finansial juga berpengaruh terhadap terjadinya masalah keuangan. (Yushita, 2017).

Survei OJK pada tahun 2022 tentang literasi keuangan di kalangan pemilik usaha menunjukkan hasil sebesar 56,99 persen. (OJK, 2023). Hal tersebut berarti bahwa sebagian pengusaha atau wirausaha sudah memiliki pemahaman keuangan yang baik, tetapi masih terdapat banyak ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keuangan. Hasil survei tersebut juga mendukung pra riset yang

peneliti lakukan terkait tingkat literasi keuangan pelaku UMKM yang ada di DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM berada pada tingkat *less literate*.

Bagaimana tingkat pemahaman anda terkait pembayaran non tunai QRIS?

18 jawaban



Gambar 1 3 Tingkat literasi keuangan UMKM

Sumber: Data diolah (2024)

Tingkat literasi keuangan *less literate* berarti bahwa pelaku UMKM hanya mengetahui informasi umum terkait produk atau layanan keuangan seperti *QRIS* tetapi tidak mengetahui manfaat, risiko, atau fitur yang terdapat didalamnya. Karena dapat membantu masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi keuangan seperti *QRIS*, maka literasi keuangan sangat penting untuk dimiliki terutama bagi para pelaku UMKM.

Terlepas dari permasalahan di atas, masih banyak pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan sistem pembayaran non tunai dengan baik. Penggunaan *QRIS* oleh pelaku UMKM juga menjadi trend positif dikalangan masyarakat di era serba digital saat ini. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teori yang dapat mengukur adopsi dan penerimaan sebuah teknologi agar dapat meneliti elemen-elemen yang mempengaruhi minat pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS. Model TAM (*Technology Accepted Model*) dari Davis (1989) merupakan salah satu model yang sering digunakan untuk mengukur penerimaan teknologi.

Tujuan utama dari TAM, menurut Davis (1989) dalam (Fatmawati, 2015), adalah untuk menjelaskan faktor apa saja yang dapat mendorong pengadopsian teknologi untuk menjelaskan perilaku pengguna. Bagaimana seorang individu mengadopsi dan menggunakan teknologi baru dikonseptualisasikan oleh model

TAM. Model ini berasal dari teori psikologis yang menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan minat untuk menjelaskan perilaku pengguna. Sederhana namun dapat memprediksi adopsi teknologi adalah ciri khas dari model TAM

Berdasarkan teori *TAM*, persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kegunaan *QRIS* dibandingkan teknologi lain menentukan bagaimana teknologi ini digunakan. Menurut penelitian (Ningsih et al., 2021) dua faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan suatu teknologi adalah persepsi manfaat yang dirasakan dan kemudahan pengguna. Persepsi manfaat atau kegunaan mengacu pada seberapa besar pengguna percaya bahwa teknologi dapat membantu mereka mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Di sisi lain, persepsi kemudahan pengguna menggambarkan seberapa besar pengguna berpikir bahwa suatu teknologi mudah digunakan dan tidak terlalu rumit.

Penelitian ini membedakan dirinya melalui fokus pada variabel-variabel utama seperti literasi keuangan, persepsi terhadap kegunaan, dan kemudahan penggunaan dalam konteks penggunaan *QRIS*. Sedangkan penelitian lainnya berfokus pada variabel kepercayaan dan resiko. Objek penelitian ini adalah *QRIS* sebagai alat pembayaran elektronik, sedangkan penelitian lain cenderung berfokus pada produk atau layanan lainnya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang mengadopsi *QRIS* sebagai alat pembayaran, sementara penelitian lain lebih fokus terhadap individu atau konsumen yang menggunakan *QRIS* dalam bertransaksi.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan analisis minat penggunaan *QRIS* pada pelaku UMKM dengan menggunakan *Technology Accepted Model*. Selain itu, peneliti juga menambahkan literasi keuangan sebagai variabel yang dianggap penting dalam mempengaruhi minat para pelaku UMKM untuk menggunakan *QRIS* sebagai metode pembayaran.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Adakah pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan *QRIS* pada pelaku UMKM di DKI Jakarta?

- 2) Adakah pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan *QRIS* pada pelaku UMKM di DKI Jakarta?
- 3) Adakah pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan *QRIS* pada pelaku UMKM di DKI Jakarta?
- 4) Adakah pengaruh literasi keuangan, persepsi kegunaan dan kemudahan terhadap minat menggunakan *QRIS* pada pelaku UMKM di DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap minat menggunakan *QRIS* pada UMKM di DKI Jakarta
- 2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat menggunakan *QRIS* pada UMKM di DKI Jakarta
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan *QRIS* pada UMKM di DKI Jakarta
- 4) Mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan, persepsi kegunaan dan kemudahan terhadap minat menggunakan *QRIS* pada UMKM di DKI Jakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan akademis, sebagai berikut:

- 1) Manfaat akademis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian di bidang pendidikan ekonomi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

- 2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberi pelaku UMKM lebih banyak pengetahuan tentang sistem dan metode pembayaran dalam transaksi digital, khususnya *Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)*.